

## Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya

Agfajrina Cindra Pamungkas<sup>1)</sup>, Yoga Andriyan<sup>2)</sup>, Muhamad Hasan Rumlus<sup>3)</sup>, Siti Maysharo Kalau<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>2)</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>3)</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

e-mail : [agfajrinacindra@unimudasorong.ac.id](mailto:agfajrinacindra@unimudasorong.ac.id)<sup>1)</sup>, [yogaandriyanmana@gmail.com](mailto:yogaandriyanmana@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[Hasanrumlus97@gmail.com](mailto:Hasanrumlus97@gmail.com)<sup>3)</sup>, [maisyarohkalau@gmail.com](mailto:maisyarohkalau@gmail.com)<sup>4)</sup>

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2023

Accepted: 19-06-2025

### Info Artikel

### Abstract

#### Keywords:

Decentralization,  
Globalization, Special  
Autonomy.

The expansion of provincial boundaries in 2022 gave rise to a new and youngest province, namely West Papua, with its capital in Sorong. Law No. 20 of 2001 granted Papua broader authority in the implementation of Special Autonomy. It explicitly states that the people of Papua and West Papua are entitled to equitable development. However Along with the development of globalization, widespread economic development in order to improve welfare is not directly proportional to policies that policies that should improve the lives of people in Papua. On the contrary, instead, it presents the exploitation of natural resources and does not provide an increase in the quality of life for indigenous Papuans. improvement in the quality of life for Indigenous Papuans (OAP) due to the development of industrial industry comes from large corporations. This paper seeks to analyze the relationship between globalization and decentralization in line with the implementation of Special Autonomy in Southwest Papua. Special Autonomy in Southwest Papua. The development of globalization encourages a system of decentralization so that decision-making is at the local government, as well as referring to economic liberalization by seeing the presence of both foreign and domestic investment in Southwest Papua. The asymmetrical decentralization implemented by Papua describes the problems that occur in the development of Southwest Papua. Problems that occur in development in Southwest Papua, this refers to the presence of foreign and domestic investment as a threat. Foreign and domestic investment as a threat to the sustainability of the welfare of indigenous Papuans. The implementation of decentralization through Special Autonomy over a period of twenty-three years, especially for indigenous Papuans. Implementation of decentralization through Special Autonomy over a period of twenty-three years, especially for indigenous Papuans, has not had a significant impact on sustainable development. in sustainable development, especially natural resources. The central government's policy through the Job Creation Law aims to expand foreign and domestic investment without regard to land rights and indigenous peoples in Southwest Papua. The low index of development index in Southwest Papua shows that through political and economic policies political and economic policies that have been established do not open up great authority for the region to to play an optimal role in managing their own land.

**Kata Kunci:**

Desentralisasi, Globalisasi,  
Otonomi Khusus.

**Abstrak**

Pemekaran wilayah provinsi di tahun 2022 melahirkan Provinsi baru dan termuda yaitu Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Papua diberikan kewenangan lebih luas dalam amanat pelaksanaan Otonomi Khusus. Secara tegas menyatakan bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat berhak atas pembangunan yang wajar dan pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, pembangunan ekonomi secara meluas demi meningkatkan kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang semestinya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Papua. Sebaliknya, justru menghadirkan eksploitasi sumber daya alam dan tidak memberikan peningkatan kualitas hidup bagi Orang Asli Papua (OAP) disebabkan pengembangan industri berasal dari korporasi besar. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis keterkaitan globalisasi dan desentralisasi selaras dengan penerapan otonomi Khusus di Papua Barat Daya. Perkembangan globalisasi mendorong sistem desentralisasi agar pengambilan keputusan berada di pemerintah daerah, serta mengacu pada liberalisasi ekonomi dengan melihat kehadiran penanaman modal baik asing dan dalam negeri di Papua Barat Daya. Desentralisasi asimetris yang diterapkan oleh Papua mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di Papua Barat Daya, hal ini mengacu keberadaan penanaman modal asing dan dalam negeri sebagai ancaman bagi keberlanjutan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua. Pelaksanaan desentralisasi melalui Otonomi Khusus selama kurun waktu dua puluh tiga tahun terutama bagi Orang Asli Papua belum berdampak secara signifikan dalam pembangunan berkelanjutan khususnya sumber daya alam. Kebijakan pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja bertujuan ekspansi penanaman modal asing dan dalam negeri tanpa memperhatikan hak-hak tanah dan masyarakat adat di Papua Barat Daya. Rendahnya indeks pembangun di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa melalui kebijakan politik dan ekonomi yang ditetapkan tidak membuka kewenangan yang besar bagi daerah berperan optimal mengelola tanah sendiri.

**A. PENDAHULUAN**

Provinsi Papua Barat Daya diresmikan melalui UU Nomor 29 Tahun 2022 pada tanggal 17 November 2022, penambahan provinsi menunjukkan Indonesia memiliki 38 Provinsi. Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mulanya dalam cakupan Provinsi Papua Barat, pemekaran provinsi bersamaan dengan tiga daerah otonom baru (DOB) guna efisiensi Pembangunan di Papua. Mempercepat pembangunan dengan membentuk Provinsi baru sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua, meliputi orang asli Papua (OAP) dan warga lainnya.<sup>1</sup> Cakupan Provinsi Papua Barat daya meliputi Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat, dengan menempatkan Kota Sorong sebagai Ibukota Provinsi. Sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua Barat Daya berkontribusi besar dalam Pembangunan ekonomi seperti potensi kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertambangan. Sektor-sektor ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB), "Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi," 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>. Diakses 18 Oktober 2024.

ekonomi kurang lebih sebesar 1.82% di sektor perdagangan.<sup>2</sup> Secara geografis PBD berbatasan langsung dengan Kawasan samudera pasifik, tentunya ini menjadi Kawasan strategis bagi provinsi agar mampu mendongkrak pembangunan ekonomi terintegrasi serta membuka jalur lalu lintas perdagangan nasional dan internasional.<sup>3</sup>

Era reformasi seperti membuka lembaran baru dengan memprakarsai demokrasi era Reformasi terlaksana hingga saat ini, menjunjung kebebasan pers, sistem multi partai dan pemilihan umum yang demokratis. Proses reformasi yang berlangsung di Indonesia sebagai peluang bagi aktivis sosial-politik Irian Jaya agar terlaksananya perubahan secara umum untuk memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) khusus Masyarakat Papua. Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) melalui TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang. Pada tahun 2000 terlaksana Kongres Rakyat Papua II untuk Menyusun Draf UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tahun 2001 barulah implementasi Otonomi Khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra putri asli Papua dalam Pembangunan berkelanjutan. Tahun 2021 diterbitkan kembali Otonomi khusus Jilid II pada Undang- Undang 2 Tahun 2021 mempertegas dalam Pasal 4 ayat 7 mengenai Kewenangan dan kelembagaan pelaksana kebijakan otonomi khusus provinsi Papua dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.<sup>4</sup>

Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua yakni Papua dan Papua Barat masih mengalami polemik terkait kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Kehadiran Otonomi khusus di Papua lahir di era reformasi dengan memunculkan kembali sistem desentralisasi, sebelumnya sistem desentralisasi pernah dilaksanakan ketika Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia-Belanda. Pasca Orde Baru, demokrasi era reformasi ditetapkan kembali sistem desentralisasi berjalan sangat dinamis sehingga berpengaruh pada peraturan Perundang-undangan cenderung mengalami perubahan. Sistem desentralisasi menghubungkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada bidang ekonomi, politik, administrasi, dan Pembangunan daerah. Konseptual desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat (sentralistik) kepada

---

<sup>2</sup> Yuvensius Lasa Banafanu, "PBD Susun Strategi Kelola Potensi SDA Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi," [www.antaraneews.com/](https://www.antaraneews.com/), May 17, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4108920/pbd-susun-strategi-kelola-potensi-sda-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>. Diakses 18 Oktober 2024.

Walikota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, "Salinan Perdano.2 Ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah-Gabungan" (2024).

<sup>4</sup> Komarudin Watubun, "Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dan Peraturan Pelaksanaanya" 1 (2023): Hal.1-2, & 7

pemerintah daerah (desentralisasi). Komitmen pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi untuk mendukung pemerataan dalam pembangunan secara optimal di daerah, penguatan demokrasi, Pembangunan berkelanjutan pada Sumber Daya Manusia (SDM), dan Infrastruktur.<sup>5</sup>

Menilik Sejarah pemekaran Papua, terutama Papua Barat Daya sebelumnya pemekaran telah terlaksana sebanyak tiga kali semula Provinsi Irian Jaya lalu Irian Jaya Barat, kemudian perubahan nomenklatur menjadi Papua Barat, barulah di Tahun 2022 pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.<sup>6</sup> Penerapan Otonomi Khusus telah berjalan selama kurang lebih 21 tahun sebelum terlaksana pemekaran provinsi baru, namun pembangunan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengacu Otonomi Khusus Jilid II Tahun 2021 belum berdampak secara signifikan bagi Pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi terutama Orang Asli Papua (OAP). BPS mencatat penduduk miskin Papua Barat Daya tahun 2024 sebesar 18,13%. Pada Bulan Maret tahun 2024 tercatat Garis kemiskinan sebesar 756.237,00 per kapita per bulan dengan komposisi sektor makanan sebesar 563.575,00 (74,52%), sedangkan pada sektor bukan makanan sebesar 192.662,00 (25,48%).<sup>7</sup> Sejumlah pengamat menyatakan implementasi otonomi khusus belum mampu mengatasi kesejahteraan di Papua secara efektif. Kesejahteraan bagi OAP masih dihadapkan dengan permasalahan dalam dimensi ekonomi (tingkat pendapatan atau daya beli), aspek kesejahteraan sosial (Pendidikan, Kesehatan, gizi, dll), hal ini berdampak pada rendahnya tingkat Pendidikan yang ditempuh, ketidaktetapan pemasukan dan standar kesehatan secara nasional. Beberapa faktor berkontribusi rendahnya indeks Pembangunan di Papua seperti, alokasi manfaat otonomi khusus pada bidang sumber daya alam tidak diprioritaskan untuk kesejahteraan Masyarakat, tidak transparansi pengelolaan dana otonomi oleh elite lokal, serta tidak terbangun sinergisitas hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Pada konteks ini perjalanan otonomi khusus mengalami permasalahan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah di PBD, meskipun peraturan penanaman modal tercatat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua,<sup>9</sup> semestinya dalam sub-urusan penanaman modal daerah secara berkelanjutan dapat mengakomodir kepentingan Masyarakat di wilayah tersebut namun terjadi sebaliknya. Liberalisasi dalam tatanan

---

<sup>5</sup> Rossy Lambelanova et al., Op.cit. Hal. 11

<sup>6</sup> Surya Dua Artha Simanjatak, "Sejarah Pemekaran Papua: Dulu Irian Jaya Kini Punya 5 Provinsi" Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'Sejarah Pemekaran Papua: Dulu Irian Jaya Kini Punya 5 Provinsi,'" [kabar24.bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com), July 2022. Diakses 10 Noveember 2024.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Papua Barat, "Persentase-Penduduk-Miskin-Papua-Barat-Daya-Maret-2024sebesar-18-1," *Laporan BPS* (Papua Barat Daya, July 1, 2024).

<sup>8</sup> Greenpeace, "Kekayaan Alam Melimpah, Kutukan Atau Anugerah Bagi Tanah Papua?," <https://www.greenpeace.org/indonesia>, December 19, 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua/>. Diakses 11 Noveember 2024.

<sup>9</sup> Watubun, "Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dan Peraturan Pelaksanaanya." Hal.345

sistem demokrasi di Indonesia memberikan peluang bagi korporasi untuk masuk ke wilayah dengan potensi sumber daya alam melimpah dengan dalih untuk membangun hilirisasi industri melalui penanaman modal di wilayah provinsi yaitu Papua Barat Daya dimana Pembangunan hilirisasi industri yang telah terbangun tidak berkontribusi sesuai dengan tujuan Otonomi Khusus.

Globalisasi berpengaruh pada trend politik sistem demokrasi sebagai sistem politik yang ideal bagi sejumlah kalangan. Demokrasi era reformasi merubah sistem politik menjadi terbuka beriringan dengan berjalannya demokratisasi menyambut kebebasan sebagai transisi pemerintahan otoritarian ke pemerintahan demokratis.<sup>10</sup> Konsekuensi kehadiran demokratisasi secara langsung mengubah bentuk hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintahan subnasional yang bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Realisasi desentralisasi melalui kebijakan Otonomi Khusus diberikan kepada provinsi-provinsi Papua khususnya Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan karakteristik khas regional didasarkan pada kecepatan perkembangan pembangunan dan kapasitas untuk tata kelola, selain itu termasuk juga pada alasan konflik dan tuntutan separatism.<sup>11</sup>

Evolusi politik yang berkembang melalui desentralisasi berbentuk Otonomi Khusus Papua bertujuan untuk menciptakan Percepatan Pembangunan daerah, namun fakta lapangan dampak dari kebijakan ini meningkatkan persaingan modal dan investasi asing yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi.<sup>12</sup> Terlebih PBD memiliki potensi SDA melimpah, hal ini terbukti industri sedang dan besar tercatat produktif di PBD sebesar 57.50%.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian yang di paparkan, adanya korelasi globalisasi dan desentralisasi dalam kebijakan Otonomi Khusus, terutama pada penanaman modal dalam pemanfaatan Sumber daya alam di Papua Barat Daya. Relevansi globalisasi beriringan demokratisasi yang mampu membuka lebar liberalisasi ekonomi dalam penanaman modal berkaitan dengan kehadiran investor untuk pengelolaan sumber daya alam. Tulisan ini berupaya menganalisis keterkaitan globalisasi dan desentralisasi selaras dengan penerapan otonomi Khusus di Papua Barat Daya, namun pelaksanaan otonomi khusus yang telah berjalan 23 tahun ini belum menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola sumber daya alam. Penulis menemukan permasalahan pembangunan di Papua Barat Daya selama 5 tahun terakhir berkaitan dengan perkembangan globalisasi dan desentralisasi dalam sektor penanaman modal berdampak pada berkelanjutan hak-hak Masyarakat hukum adat.

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>10</sup> Ahmad. Safril Mubah, *Isu-Isu Globalisasi Kontemporer. Graba Ilmu: Yogyakarta* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). Hal. 16

<sup>11</sup> Lambelanova et al., *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. Hal. 79 & 114

<sup>12</sup> Ignacio Jurado and Sandra León, "Economic Globalization and Decentralization: A Centrifugal or Centripetal Relationship?," *Governance* 34, no. 3 (July 4, 2021): 665–86, <https://doi.org/10.1111/gove.12496>. Hal. 682

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Barat, *Statistik Industri Besar Dan Sedang Provinsi Papua-Barat 2019* (Manokwari: CV.Nario Sari, n.d.). Hal.17

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji relevansi globalisasi dan desentralisasi terutama pada penerapan otonomi khusus. Sasaran penelitian berfokus permasalahan yang timbul dari globalisasi yang tidak selaras dengan desentralisasi (Otsus). Metode pengumpulan data dilaksanakan dari Januari-Desember 2024 di Papua Barat Daya dengan penekatan kajian pustaka yang diambil dari Buku Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pelaksanaan, Jurnal, laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, berita, surat kabar online mengenai Otonomi khusus, dan Pembangunan di PBD, Daya, Peraturan Bupati dan Walikota Sorong, dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026. Penulis menganalisis dengan pendekatan menggunakan pendekatan konsep globalisasi dan desentralisasi untuk melihat permasalahan pembangunan di PBD. Alasan peneliti memilih PBD yaitu, pertama Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru dari pemekaran Provinsi Papua Barat, telah terlaksana otonomi khusus (otsus) Papua, sejak Otsus diresmikan di tahun 2001. Kedua, Industri yang berkembang di PBD dapat dikatakan cukup pesat, namun dalam Pembangunan segala aspek BPS mencatat PBD berada di urutan bawah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1. Pengertian Globalisasi dan Liberalisasi

Pandangan James Rosenau mengatakan: “Globalisasi adalah sebuah label yang dinantikan oleh Masyarakat luas, aktivitas, norma, ide, barang, pelayanan dan mata uang secara prakteknya membatasi ruang gerak pada batas geografis, lokal dan praktik secara langsung. Terdapat empat kelompok isu yang terpisahkan namun saling berkaitan dan relevan: (a). ekonomi makro (perdagangan dan keuangan), (b). Ekonomi mikro (revolusi teknologi dan proses produksi), (c). budaya dan media, dan (d). tekanan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Menuntun kerjasama bilateral dan regional dalam demokrasi dan hak asasi manusia, dan sebagai syarat keanggotaan organisasi regional dan internasional.<sup>14</sup>

Globalisasi mencakup definisi yang luas, salah satunya globalisasi adalah liberalisasi. Konteks liberalisasi mengacu pada proses yang menghapus pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap pergerakan ekonomi global secara terbuka dan tanpa batas.<sup>15</sup> Perekonomian internasional dewasa ini merupakan bentuk dari intergrasi globalisasi ekonomi melalui perdagangan (pasar bebas), penanaman modal asing (*Foreign direct investment*) oleh Perusahaan multinasional, perkerja internasional, kemanusiaan, arus teknologi baik

---

<sup>14</sup> Barbara Stallings, “Globalization and Liberalization: The Impact on Developing Countries. *Macroeconomía Del Desarrollo*” (Santiago, December 2001). Hal.9

<sup>15</sup> Hakem Ghasemi, “Globalization and International Relations: Actors Move from Non-Cooperative to Cooperative Games,” *Jurnal Global Dan Strategis* 4, no. 1 (2010). Hal 3.

dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Globalisasi ekonomi memberikan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun dalam pendistribusian kekayaan pada konteks liberal tidak merata dan menciptakan kompetitif yang ketat.<sup>16</sup>

Menurut David Held melihat globalisasi terbagi tiga konteks yakni: *hyperglobalist*, *sceptical*, dan *transformasionalist*. Secara spesifik mengacu pada pandangan *sceptical* menilai kekuatan-kekuatan global sangat bergantung pada kekuatan pemerintah nasional untuk mengatur regulasi yang bisa melancarkan liberalisasi ekonomi.<sup>17</sup> liberalisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kehadiran penanaman modal asing (PMA). Secara tidak langsung masuknya PMA berpengaruh terhadap lapangan kerja oleh Perusahaan multinasional sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan pada suatu negara. Pada sisi lain mencatat bahwa Perusahaan multinasional cenderung memperkerjakan tenaga kerja terampil. Contohnya pada Perusahaan multinasional di Afrika berfokus pada pengelolaan sumber daya alam cenderung membatasi lapangan kerja hal ini berdampak pengurangan angka kemiskinan.<sup>18</sup>

Globalisasi memberikan fasilitas untuk mengakses sumber keuangan eksternal melalui integrasi ekonomi, meniadakan pembatasan pada perdagangan internasional untuk memperkuat lintas batas jalur perdagangan, akses lebih besar pada pemerintah subnasional mendapatkan alternatif sumber keuangan. Kehadiran desentralisasi dapat berkontribusi untuk meningkatkan akses pemerintah daerah terhadap mekanisme pasar dengan mendorong penyediaan barang public yang efisien dalam pembiayaan kehadiran globalisasi memiliki berpotensi untuk meningkatkan konflik etnis melalui dampak ekonomi asimetris di seluruh wilayah.<sup>19</sup> Globalisasi dan desentralisasi bisa saja menjadi sumber terpenting dari transformasi negara-bangsa selama beberapa dekade terakhir. Peralihan kekuasaan telah berpindah tidak lagi berpusat pada pemerintah pusat dengan terbentuknya organisasi internasional dan integrasi ekonomi. Pelimpahan kekuasaan dalam pengambilan keputusan berada di pemerintah daerah atau lokal. Integrasi di pasar global mendorong proses adaptasi kelembagaan di mana negara-negara cenderung menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada daerah.

---

<sup>16</sup> Markus Kornprobst and T. V. Paul, "Globalization, Deglobalization and the Liberal International Order," *International Affairs* 97, no. 5 (2021): 1305–16, <https://doi.org/10.1093/ia/iab120>. Hal.1307

<sup>17</sup> Safril Mubah, *Op.cit.* Hal.18

<sup>18</sup> Elizabeth Asiedu and Kwabena Gyimah-Brempong, "The Effect of the Liberalization of Investment Policies on Employment and Investment of Multinational Corporations in Africa," 2008. Hal.51

<sup>19</sup> Ignacio Jurado and Sandra León *Op.cit.* Hal.672

## C.2. Desentralisasi & Otonomi Daerah

Desentralisasi tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Mengutip dari Riswanda Imawan “Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan *Good Governance*” Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintah yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local Government*), disana terjadi ‘... a “superior” government -one encompassing a large jurisdiction-assign responsibility, authority, or function to ‘lower’ government unit -one encompassing a smaller jurisdiction- that is assumed to have some degree of autonomy” Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal).<sup>20</sup>

Indonesia menjalankan Desentralisasi Asimetris sebagaimana mengatur secara khusus status keistimewaan atau kekhasan daerah. Pada dasarnya desentralisasi yang diberikan kepada Papua berupa pemberian otoritas bagi daerah untuk mengatur dan urusan rumah tangga tetap naungan kerangka kerja negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan bagi pemerintah daerah agar memanfaatkan kekayaan alam di Papua untuk kesejahteraan, kemakmurn Masyarakat Papua. Peningkatan kapasitas berupa pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam perumusan kebijakandaerah dan turut andil dalam membangun pembangunan yang berkeadilan. Desentralisasi asimetris yang diterapkan di Papua pada dasarnya adalah pemberian. Otonomi khusus merupakan otoritas khusus yang diakui dan diberikan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi (Papua, Papua Barat, dan Aceh) untuk secara mandiri mengelola dan menangani kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan inisiatif mereka sendiri, yang didasarkan pada aspirasi dan hak-hak dasar penduduk lokal.<sup>21</sup> Keistimewaan papua memiliki Masyarakat adat. Lazimnya, Masyarakat Hukum Adat didirikan, terdiri dari penduduk asli Papua yang, sejak lahir, mendiami wilayah yang ditentukan dan terikat oleh hukum adat tertentu, menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat di antara konstituennya. Setiap masyarakat hukum adat memiliki Hak Ulayat, yang mengacu pada hak asosiasi dengan komunitas hukum adat tertentu atas wilayah yang ditunjuk yang merupakan lingkungan hidup penghuninya, yang mencakup hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air bersama dengan sumber daya mereka sesuai dengan peraturan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Secara Umum Dan Desentralisasi Asimetris Di Indonesia* (Yogyakarta: Nusamedia, 2014). Hal. 7

<sup>21</sup> Lambelanova et al., op.cit. Hal. 78

<sup>22</sup> Ibid.

## D. PEMBAHASAN

### D.1. Pembangunan Papua Barat Daya

Perkembangan ekonomi global menempatkan Sorong sebagai kawasan strategis di wilayah Asia Pasifik dengan memiliki potensi Pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Pusat membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong sebagai katalis Pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Penetapan KEK Sorong dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan integrasi ekonomi.<sup>23</sup> . Penduduk asli Papua Barat Daya mayoritas berasal dari suku Moi, Sorong disebut juga sebagai Tanah Adat Moi. Penerapan status Otonomi Khusus Papua diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Esensi Otonomi Khusus menekankan keterlibatan masyarakat dan hak-hak masyarakat adat, sementara pengelolaan hak atas tanah adat telah mengakibatkan berkurangnya otoritas karena kerangka legislatif sebelumnya yang mengatur tanah adat, sehingga secara bersamaan memperkuat kekuasaan negara atas kepemilikan tanah melalui kelimpahan otoritas agraria di dalam wilayah nasional.<sup>24</sup>

Masa otonomi daerah membutuhkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk menggaet investasi bertujuan membuka peluang kerja dan mengakomodasi terserap tenaga kerja lokal. Ekonomi merupakan salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah.<sup>25</sup> Pemenuhan sumber daya ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersumber dari pemerintah atasnya atau pemungutan pajak dan retribusi yang tertuang pada peraturan daerah. Peran pemerintah daerah memfasilitasi berjalannya iklim investasi di daerah tersebut dengan menawarkan ketersediaan dan potensi sumber daya yang dimiliki dan memberikan kepastian hukum bagi calon investor. Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen dalam pelaksanaan penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyesuaikan Perusahaan yang terdaftar di Koordinator Penanaman Modal RI sehingga pelaksanaan penanaman modal di daerah dapat terukur.

Penanaman modal yang diberikan oleh investor berasal juga dari pemerintah pusat. Kedatangan investor hadir di PBD melalui deregulasi peraturan-peraturan yang dapat menghambat pengembangan investasi di Kawasan pertumbuhan ekonomi, hal ini menarik

---

<sup>23</sup> Yusuf Mujiono Dwi Urip Premono, *Kabupaten Sorong Kepemimpinan Ala Penjabat Bupati Sorong Wujudkan Sorong Sebagai Rumah Kebhinekaan Miniatur Indonesia Timur* (Sorong: P3ISIP, 2023). Hal.20

<sup>24</sup> Sarah Nita Hasibuan, "Special Autonomy in Papua and West Papua: An Overview of Key Issues," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 2, no. 2 (November 2022): 145–58, <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.145-158>. Hal. 146

<sup>25</sup> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Sorong, "Rencana Strategis Dpmpptsp - 2026" (2023). Hal.21

bagi para investor untuk memberikan investasi ke daerah. Melalui Undang-Undang Cipta kerja memudahkan para investor mendapatkan izin yang sebelumnya mendapatkan hambatan bagi korporasi. Sisi lain kemudahan perizinan masuknya korporasi dan UU Cipta Kerja tidak lagi mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan Masyarakat adat atau komunitas lokal sebagai pemilik hak atas wilayah/Kawasan tersebut.<sup>26</sup> Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Pusat berupaya mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau badan usaha untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan daerah. Peraturan Presiden (Perpres) No.3/2016 tentang percepatan Proyek Strategis Nasional, salah satu proyek strategis nasional (PSN) berada di Kabupaten Sorong yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.<sup>27</sup>

Tahun 2014 ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pendongkrak Pembangunan di Tanah Papua. Luas KEK sebesar 6.000 hektar mencakup Pabrik semen, pabrik aspal curah, pabrik kayul lapis, tabung gas, kilang CPO dan smelter nikel. Berdirinya Pelabuhan laut internasional di KEK berlokasi di Arar, realisasi integrasi Pelabuhan peti kemas di Sorong yang terintegrasi dengan pelabuhan kota Sorong, dengan begitu memudahkan berbagai komoditas yang ada di kawasan tersebut dapat disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri<sup>28</sup> Pengembangan KEK Sorong terus di Upaya oleh Pemkab Sorong dengan melakukan Kerjasama ekonomi bersama Investor Dalam Negeri. Kedua belah pihak baik Pemkab dan Investor dalam negeri yaitu PT Huahe Management Indonesia, PT Sino Consultant Investment Indonesia, dan PT Malamoi Olom Wonok telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) di Kabupaten Sorong.<sup>29</sup> Pembangunan ekonomi melalui industri pertambangan, Perkebunan, migas, sektor utama dalam penanaman modal baik oleh asing dan dalam negeri yang berada di wilayah Papua Barat Daya. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong sebagai daerah berpotensi bagi Investor Asing. Pelaksanaan Penanaman modal asing di Papua Barat Daya tidak terlepas dari pemerintah Pusat untuk menawarkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan Menyusun Langkah strategis nasional melalui UU Cipta Kerja di Tahun 2020, dalam rangka memudahkan penanaman modal oleh pihak swasta berkordinasi

---

<sup>26</sup> Laporan Kajian Eksternal and Yayasan Econusa oleh Tim Remdec, "Baca Ulang Timur: Yayasan Econusa Tanah Papua Dan Maluku Terkini," 2022. Hal.21-22

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Dwi Urip Premono, op.cit.

<sup>29</sup> Lili Handayani, "Smelter Nikel Pertama Di Sorong Akan Segera Dibangun," <https://nikel.co.id/2024/05/30/smelter-nikel-pertama-di-sorong-akan-segera-dibangun/>, May 30, 2024. diakses 2 Januari 2025.

dengan pemerintah baik Pemerintah Pusat dan daerah terlaksana. Meskipun Papua Barat Daya menerapkan otonomi khusus, namun dalam pelaksanaan Penanaman modal tertulis dalam Otonomi Khusus Jilid II, faktanya kemudahan bagi para investor masuk ke wilayah Papua Barat Daya tidak berkordinasi dengan Masyarakat, ketimpangan masih menjadi permasalahan utama di Provinsi ini.

## **D.2. Problematika Pembangunan di Papua Barat Daya**

Ekspansi korporasi di Papua Barat Daya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan

Pembangunan berkelanjutan. Tanah Papua sebagai benteng terakhir terhadap mitigasi perubahan iklim di Indonesia dan Global. Tanah Papua menyimpan hutan tropis sebesar 34 juta hektar. Deforestasi dan degradasi tidak dapat di pungkiri berakibat pada konsentrasi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan kenaikan suhu bumi<sup>30</sup> Papua Barat Daya semula (Papua Barat) Perlindungan hutan adat di Papua hingga hari ini masih terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat adat. Masyarakat adat mengkhawatirkan izin negara menjadikan Kawasan hutan adat sebagai wilayah operasional Perusahaan terutama industri sawit. Hutan adat Moi sebagai Lokasi operasional PT Sorong Agro Sawitindo (SAS), Masyarakat adat melakukan gugatan kepada PT SAS karena penyerobotan tanah adat seluas 18.160 hektar.<sup>31</sup> Penggunaan tanah adat menjadi permasalahan utama dalam Pembangunan di Papua Barat Daya terutama dengan masuknya Perusahaan atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut ini beberapa permasalahan utama dalam penanaman modal yaitu:

### **a) Ancaman Masyarakat Adat Moi dengan kehadiran KEK Sorong**

Pembangunan KEK Sorong berdampak langsung pada kelangsungan hidup bermarga (Gelek) Kammi. Tanah adat seluas 523,7 Ha terancam hilang yang berdampak pula bagi ruang hidup Masyarakat adat kabupaten Sorong secara menyeluruh. Penggunaan lahan adat ini memberikan kompensasi bagi Masyarakat adat, namun kompensasi yang diberikan terbilang kecil. Sementara itu, bagi pemilik modal KEK Sorong

---

<sup>30</sup> TATANG MULYANA SINAGA, "Papua, Benteng Kita Yang Tersisa ," <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/01/08/papua-benteng-kita-menjaga-hutan-indonesia>, January 8, 2022. Diakses 5 Januari 2025.

<sup>31</sup> Noverius Laoli, "Perusahaan Kelapa Sawit Masuk, Masyarakat Papua Minta Perlindungan Hutan Adat Artikel Ini Telah Tayang Di Kontan.Co.Id Dengan Judul 'Perusahaan Kelapa Sawit Masuk, Masyarakat Papua Minta Perlindungan Hutan Adat', Klik Untuk Baca: <https://Regional.Kontan.Co.Id/News/Perusahaan-Kelapa-Sawit-Masuk-Masyarakat-Papua-Minta-Perlindungan-Hutan-Adat> ." <https://regional.kontan.co.id/news/perusahaan-kelapa-sawit-masuk-masyarakat-papua-minta-perlindungan-hutan-adat>, July 7, 2024. Diakses 5 Januari 2025.

sebagai peluang strategis untuk meraup keuntungan besar tanpa mempertimbangkan kelangsungan hak-hak Masyarakat adat papua terutama suku Moi. Investasi telah hadir sejak tahun 1935, fakta lapangan menunjukkan suku Moi hingga saat ini masih dalam kategori miskin jauh dari kesejahteraan. Potensi Sumber Daya Alam yang tersedia telah dirampas oleh Investor dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. Fenomena ini sangat jelas menggambarkan bahwa Suku Moi terancam di Negara sendiri<sup>32</sup> Kehilangan tanah adat turut dirasakan oleh Masyarakat adat di lembah Klaso kabupaten Sorong. Pembangunan infrastruktur bendungan Warmansom sebagai Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) menghilangkan tanah adat ±60 marga (gelek) seluas ± 670,74 Ha. Kementerian PUPR selaku penganggung jawab proyek menyampaikan Pembangunan bendungan ini guna pembangkit Listrik di KEK Sorong untuk pemasok Listrik dalam industri pengolahan hasil hutan & non kayu, nikel, kelapa sawit dan lainnya.<sup>33</sup>

#### **b) Ancaman Pangan Lokal oleh Hutan Sawit**

Masyarakat adat Suku Moi bergantung hidup dari hutan komunal yang di jaga secara turun temurun yang dimanfaatkan oleh marga-marga yang mendiami hutan adat. Sumber pangan protein nabati Masyarakat adat berasal dari Pisang, keladi, ubi, sagu dan cempedak, sementara untuk protein hewani berasal hasil aneka tangkapan laut, babi, Rusa dan lainnya. Sumber pangan tersebut adalah sumber karbohidat dan protein dan berbagai nutrisi yang berperan dalam kecukupan gizi dan mencegah stunting. Kepercayaan Masyarakat adat bahwa kekayaan alam terutam berada di hutan tidak boleh habis dan perlu diwariskan oleh generasi selanjutnya. Saat berburu mereka melakukan pembatasan berburu hewan, begitupun dengan hasil panen yang tersedia di hutan agar kelestarian hutan sekaligus rumah satwa tetap terjaga.<sup>34</sup>

Sagu salah satu pangan lokal sekaligus pangan utama bagi Masyarakat adat. Keberadaan sagu tidak hanya sebagai sumber pangan, namun turut membantu perekonomian Masyarakat adat secara mandiri. Kini, hutan sagu sebagai satu-satunya sumber kehidupan mereka terancam beralih fungsi lahan menjadi hutan sawit. PT Inti Kebun Sejahterah (IKSJ) menggusur hutan adat dan dusun sagu marga Klagilit sebesar Panjang berkisar 300 meter dan lebar 10 meter. Penggusuran lahan tersebut berampak pada kehilangan pohon sagu sejumlah 1000 pohon dan berbagai jenis pohon yang

---

<sup>32</sup> Ambo Klagilit, "KEK Menjadi Ancaman Bagi Masyarakat Adat Moi Di Sorong," <https://laolao-papua.com/2023/01/24/kek-menjadi-ancaman-bagi-masyarakat-adat-moi-di-sorong/>, January 23, 2023. Diakses 5 januari 2025.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Lusya Arumingtyas, "Masyarakat Moi Kelim Bergantung Hidup Dari Alam," June 3, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/masyarakat-moi-kelim-bergantung-hidup-dari-alam/>.

memiliki potensi ekonomi, sehingga kerugian ini diperkirakan senilai 2,5%.<sup>35</sup>

### C. Deforestasi dari Industri Pertambangan

Pertambangan di wilayah Papua Barat Daya terus mengalami perluasan beriringan dengan kebijakan ekstraktif dalam sektor kehutanan. Setiap Tahun Papua terus mengalami deforestasi dan degradasi hingga penurunan jumlah hutan gambut sebesar 34,4 juta Ha. Terlebih lagi pengalihan fungsi lahan menjadi area industri seperti hutan sawit dan pertambangan. Berikut ini tabel Potensi Deforestasi Papua Daya pada laporan Tahun 2022.<sup>36</sup>

**Tabel 1.**  
**Potensi Deforestasi<sup>37</sup>**

Provinsi	PotensiDeforestasi (Ha)
Papua Barat Daya	465.617,21

Sumber: Laporan oleh Kerjasama Indef dan Greenpeace Indonesia

Pembaruan UU Otonomi Khusus Jilid II ditandai dengan pengesahan UU Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat disusul Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah melaksanakan rencana Pembangunan daerah lebih cepat dan efisien. Pemekaran provinsi baru di Papua salah satunya Provinsi Papua Barat Daya masih belum tuntas sebelum terjadi pemekaran. Tiga permasalahan yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi seiring dengan globalisasi dan desentralisasi seperti kelompok separatism, tingginya angka stunting sebesar 31% oleh Muhadjir Effendy sebagai Kemenko, PMK RI (Yuvensius Lasa Banafanu 2024a), dan penduduk miskin dari perkotaan dan pedesaan berjumlah 102,27.<sup>38</sup>

### E. KESIMPULAN

Otonomi khusus di Papua telah berjalan selama  $\pm 23$  tahun. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi baru atau daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua, dengan usia dua tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan industri di wilayah Papua Barat

---

<sup>35</sup> Reiner Brabar, "Seribu Pohon Sagu Di Sorong Digusur Demi Menanam Kelapa Sawit," <https://suarapapua.com/2024/06/05/seribu-pohon-sagu-di-sorong-digusur-demi-menanam-kelapa-sawit/>, June 5, 2024.

<sup>36</sup> "Otonomi Khusus Dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua Laporan Ini Merupakan Hasil Kerjasama Indef Dengan Greenpeace Indonesia," n.d. Hal. 19

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Papua Barat, "Persentase-Penduduk-Miskin-Papua-Barat-Daya-Maret-2024sebesar-18-1."

Daya terus mengalami perluasan baik dari asing dan dalam negeri. Transformasi politik dan ekonomi bersamaan dengan fenomena globalisasi menjadikan mekanisme pasar lebih luas yaitu liberalisasi ekonomi sehingga saling terintegrasi, aktor penggerak ekonomi tidak hanya pemerintah, namun Perusahaan multinasional, individu, organisasi internasional, berperan besar dalam menciptakan ekonomi internasional melalui jalur perdagangan dan ekonomi lebih terbuka tanpa ada batasan. Provinsi Papua menjalankan sistem desentralisasi melalui UU otonomi Khusus dengan tujuan untuk mempercepat Pembangunan secara merata dan berkeadilan serta memprioritaskan hak-hak kekhususan terutama bagi Orang Asli Papua agar lebih Sejahtera dengan potensi sumber daya yg dimiliki oleh Papua.

Implementasi otonomi Khusus Papua berjalan selama dua dekade berkontribusi besar bagi Orang Asli Papua dalam pemanfaatan Sumber daya Manusia dan sektor Pendidikan. Pada sektor lain, terutama pada pemanfaatan sumber daya alam otonomi khusus belum memenuhi dalam perlindungan hutan dan Masyarakat adat. Provinsi Papua Barat Daya masih mengalami berbagai permasalahan yang krusial seperti: pertama, Top-down kebijakan perlindungan hutan adat. Hal ini dipicu dengan UU Cipta Kerja era Presiden Jokowi memudahkan para penanam modal mendapat akses hutan adat tanpa persetujuan Masyarakat adat. Kedua, potensi sumber daya alam di wilayah Papua Barat Daya bukan kepemilikan pemerintah daerah dan Masyarakat setempat. Ketiga, overlapping perizinan tanah adat terus berlanjut tidak menemukan kebijakan tepat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sub-nasional dan pemerintah daerah tingkat regional, sehingga deforestasi dan degradasi hutan gambut mencakup hutan adat terus berlanjut dan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tentunya memicu krisis pangan hingga berdampak pada stunting, hilangnya hutan sagu, dan kemandirian ekonomi Masyarakat adat. Desentralisasi asimetris menjadi sebuah jalan bagi Indonesia untuk memberikan otoritas secara leluasa untuk mengatur rumah tangga suatu daerah yang diberikan melalui UU Otonomi Khusus. Pada sisi lain, perubahan tatanan global melalui globalisasi seperti kebijakan ekonomi dan politik dalam sistem liberalisasi mengikat suatu daerah memiliki potensi besar seperti Papua Barat Daya tidak sepenuhnya berdaya mengelola tanah sendiri. Terlebih indeks Pembangunan Papua Barat daya terbelah rendah, hal ini dilihat dari angka stunting, penduduk miskin dan tingkat Pendidikan dan keterampilan. Dampak dari liberalisasi ekonomi tidak Melihat keberadaan Masyarakat adat, kemudian Perusahaan multinasional, penanaman modal semakin menguasai daerah, namun kapasitas sumber daya manusia terutama Orang Asli Papua mengacu pada tujuan

SDG's dapat dikatakan belum memenuhi tujuan Pendidikan secara inklusif dan merata. Hal ini memicu konflik atau Gerakan separatisme yang terus berlangsung di Papua. Secara fundamental desentralisasi di Papua berkontribusi besar dalam akselerasi Pembangunan di Papua, hanya saja Otonomi khusus belum bisa membentengi ancaman ekstraktif, mengingat intergrasi ekonomi dalam pendekatan liberalisasi memudahkan para korporasi untuk menguasai tanah adat dengan dukungan pemerintah pusat.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Ambo Klagilit. (2023, January 23). *KEK Menjadi Ancaman Bagi Masyarakat Adat Moi di Sorong*. <https://laolao-papua.com/2023/01/24/kek-menjadi-ancaman-bagi-masyarakat-adat-moi-di-sorong/>. Diakses 5 Januari 2025.
- Asiedu, E., & Gyimah-Brempong, K. (2008). *The Effect of the Liberalization of Investment Policies on Employment and Investment of Multinational Corporations in Africa*.
- Badan Pusat Statistik Papua Barat. (2024). *persentase-penduduk-miskin-papua-barat-daya-maret-2024sebesar-18-1*. In *Laporan BPS (Issue Sosial)*.
- Barat, B. P. S. P. P. B. (n.d.). *Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Papua-Barat 2019*. CV.Nario Sari.
- RENCANA STRATEGIS DPMPTSP2023 - 2026, (2023).
- Dwi Urip Premono, Y. M. (2023). *Kabupaten Sorong Kepemimpinan Ala Penjabat Bupati Sorong Wujudkan Sorong sebagai Rumah Kebhinekaan Miniatur Indonesia Timur*. P3ISIP.
- Ghasemi, H. (2010). Globalization and International Relations: Actors Move from Non-cooperative to Cooperative Games. *Jurnal Global Dan Strategis*, 4(1), 1–13.
- Greenpeace. (2022, December 19). *Kekayaan Alam Melimpah, Kutukan atau Anugerah bagi Tanah Papua?* <https://www.Greenpeace.Org/Indonesia>.  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua/>
- Hasibuan, S. N. (2022). Special Autonomy in Papua and West Papua: An Overview of Key Issues. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(2), 145–158. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.145-158>
- Jurado, I., & León, S. (2021a). Economic globalization and decentralization: A centrifugal or centripetal relationship? *Governance*, 34(3), 665–686.

<https://doi.org/10.1111/gove.12496>

Jurado, I., & León, S. (2021b). Economic globalization and decentralization: A centrifugal or centripetal relationship? *Governance*, 34(3), 665–686.  
<https://doi.org/10.1111/gove.12496>

Kajian Eksternal, L., & Yayasan Econusa oleh Tim Remdec. (2022). *BACA ULANGINDONESIA TIMUR:YAYASAN ECONUSASITUASI TANAH PAPUA DANKEPULAUAN MALUKU TERKINI*.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2022). *Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi*.  
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>

Kornprobst, M., & Paul, T. V. (2021). Globalization, deglobalization and the liberal international order. *International Affairs*, 97(5), 1305–1316.  
<https://doi.org/10.1093/ia/iiab120>

Lambelanova, R., Ip, S., Si, M., Jaelani, R., Stp, S., & Tr, M. I. P. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia* (Issue Politik pemerintahan).

Lili Handayani. (2024, May 30). *Smelter Nikel Pertama di Sorong akan Segera Dibangun*.  
<https://Nikel.Co.Id/2024/05/30/Smelter-Nikel-Pertama-Di-Sorong-Akan-Segera-Dibangun/> .

Lusia Arumingtyas. (2019, June 3). *Masyarakat Moi Kelim Bergantung Hidup dari Alam*.  
<https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/masyarakat-moi-kelim-bergantung-hidup-dari-alam>

Ni'matul Huda. (2014). *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Nusamedia .

Noverius Laoli. (2024, July 7). *Perusahaan Kelapa Sawit Masuk, Masyarakat Papua Minta Perlindungan Hutan Adat* Artikel ini telah tayang di [Kontan.co.id](https://kontan.co.id) dengan judul “Perusahaan Kelapa Sawit Masuk, Masyarakat Papua Minta Perlindungan Hutan Adat”, Klik untuk baca:  
<https://regional.kontan.co.id/news/perusahaan-kelapa-sawit-masuk-masyarakat-papua-minta-perlindungan-hutan-adat> . . <https://Regional.Kontan.Co.Id/News/Perusahaan-Kelapa-Sawit-Masuk-Masyarakat-Papua-Minta-Perlindungan-Hutan-Adat>.

Otonomi Khusus Dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua Laporan Ini Merupakan Hasil

- Kerjasama Indef Dengan Greenpeace Indonesia. (N.D.).
- Reiner Brabar. (2024, June 5). *Seribu Pohon Sagu di Sorong Digusur Demi Menanam Kelapa Sawit*.  
<https://suarapapua.com/2024/06/05/Seribu-Pohon-Sagu-Di-Sorong-Digusur-Demi-Menanam-Kelapa-Sawit/>.
- Safri Mubah, A. (2015). *Isu-isu Globalisasi Kontemporer*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Stallings, B. (2001). *Globalization and Liberalization: The Impact on Developing Countries. macroeconomía del desarrollo*.
- Surya Dua Artha Simanjatak. (2022, July). *Sejarah Pemekaran Papua: Dulu Irian Jaya Kini Punya 5 Provinsi* Artikel ini telah tayang di *Bisnis.com* dengan judul "Sejarah Pemekaran Papua: Dulu Irian Jaya Kini Punya 5 Provinsi." *Kabar24.Bisnis.Com*.
- Tatang Mulyana Sinaga. (2022, January 8). *Papua, Benteng Kita yang Tersisa* .  
<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/01/08/papua-benteng-kita-menjaga-hutan-indonesia>.
- Salinan Perdano.2 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah-Gabungan, 317 (2024).
- Watubun, K. (2023). *Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pelaksananya. 1, 1,2 &7*.
- Yuvensius Lasa Banafanu. (2024, May 17). *PBD susun strategi kelola potensi SDA dongkrak pertumbuhan ekonomi*. [Www.AntaraneWS.Com/](https://www.antaranews.com/berita/4108920/pbd-susun-strategi-kelola-potensi-sda-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi).  
<https://www.antaranews.com/berita/4108920/pbd-susun-strategi-kelola-potensi-sda-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>
- Ambo Klagilit. "KEK Menjadi Ancaman Bagi Masyarakat Adat Moi Di Sorong."  
<https://laolao-papua.com/2023/01/24/kek-menjadi-ancaman-bagi-masyarakat-adat-moi-di-sorong/>, January 23, 2023.
- Asiedu, Elizabeth, and Kwabena Gyimah-Brempong. "The Effect of the Liberalization of Investment Policies on Employment and Investment of Multinational Corporations in Africa," 2008.
- Badan Pusat Statistik Papua Barat. "Persentase-Penduduk-Miskin-Papua-Barat-Daya-Maret-2024sebesar-18-1." *Laporan BPS*. Papua Barat Daya, July 1, 2024.
- Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. *Statistik Industri Besar Dan Sedang Provinsi*

- Papua-Barat 2019*. Manokwari: CV.Nario Sari, n.d.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sorong. RENCANA STRATEGIS DPMPPTSP2023 - 2026 (2023).
- Dwi Urip Premono, Yusuf Mujiono. *Kabupaten Sorong Kepemimpinan Ala Penjabat Bupati Sorong Wujudkan Sorong Sebagai Rumah Kebhinekaan Miniatur Indonesia Timur*. Sorong: P3ISIP, 2023.
- Ghasemi, Hakem. “Globalization and International Relations: Actors Move from Non-Cooperative to Cooperative Games.” *Jurnal Global Dan Strategis* 4, no. 1 (2010): 1–13.
- Greenpeace. “Kekayaan Alam Melimpah, Kutukan Atau Anugerah Bagi Tanah Papua?” <https://www.greenpeace.org/indonesia>, December 19, 2022. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/55951/kekayaan-alam-melimpah-kutukan-atau-anugerah-bagi-tanah-papua/>.
- Hasibuan, Sarah Nita. “Special Autonomy in Papua and West Papua: An Overview of Key Issues.” *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 2, no. 2 (November 2022): 145–58. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.145-158>.
- Jurado, Ignacio, and Sandra León. “Economic Globalization and Decentralization: A Centrifugal or Centripetal Relationship?” In *Governance*, 34:665–86. Blackwell Publishing Ltd, 2021. <https://doi.org/10.1111/gove.12496>.
- Kajian Eksternal, Laporan, and Yayasan Econusa oleh Tim Remdec. “BACA ULANG TIMUR:YAYASAN ECONUSA TANAH PAPUA DAN MALUKU TERKINI,” 2022.
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi,” 2022. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/provinsi-papua-barat-daya-diresmikan-indonesia-sekarang-miliki-38-provinsi>.
- Kornprobst, Markus, and T. V. Paul. “Globalization, Deglobalization and the Liberal International Order.” *International Affairs* 97, no. 5 (2021): 1305–16. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab120>.
- Lambelanova, Rossy, S Ip, M Si, Riyan Jaelani, S Stp, and M I P Tr. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, 2022.

- Lili Handayani. “Smelter Nikel Pertama Di Sorong Akan Segera Dibangun.” [https://nikel.co.id/2024/05/30/smelter-nikel-pertama-di-sorong-akan-segera-dibangun](https://nikel.co.id/2024/05/30/smelter-nikel-pertama-di-sorong-akan-segera-dibangun/) /, May 30, 2024.
- Lusia Arumingtyas. “Masyarakat Moi Kelim Bergantung Hidup Dari Alam,” June 3, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/masyarakat-moi-kelim-bergantung-hidup-dari-alam/> .
- Ni'matul Huda. *Desentralisasi Secara Umum Dan Desentralisasi Asimteris Di Indonesia*. Yogyakarta: Nusamedia , 2014.
- Noverius Laoli. “Perusahaan Kelapa Sawit Masuk, Masyarakat Papua Minta Perlindungan Hutan Adat Artikel Ini Telah Tayang Di Kontan.Co.Id Dengan Judul ‘Perusahaan Kelapa Sawit Masuk, Masyarakat Papua Minta Perlindungan Hutan Adat’, Klik Untuk Baca: <https://Regional.Kontan.Co.Id/News/Perusahaan-Kelapa-Sawit-Masuk-Masyarakat-Papua-Minta-Perlindungan-Hutan-Adat> .” <https://regional.kontan.co.id/news/perusahaan-kelapa-sawit-masuk-masyarakat-papua-minta-perlindungan-hutan-adat> , July 7, 2024.
- “Otonomi Khusus Dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua Laporan Ini Merupakan Hasil Kerjasama INDEF Dengan Greenpeace Indonesia,” n.d.
- Reiner Brabar. “Seribu Pohon Sagu Di Sorong Digusur Demi Menanam Kelapa Sawit.” <https://suarapapua.com/2024/06/05/seribu-pohon-sagu-di-sorong-digusur-demi-menanam-kelapa-sawit/> , June 5, 2024.
- Safriil Mubah, Ahmad. *Isu-Isu Globalisasi Kontemporer. Graha Ilmu: Yogyakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Stallings, Barbara. “Globalization and Liberalization: The Impact on Developing Countries. Macroeconomía Del Desarrollo.” Santiago, December 2001.
- Surya Dua Artha Simanjutak. “Sejarah Pemekaran Papua: Dulu Irian Jaya Kini Punya 5 Provinsi Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul ‘Sejarah Pemekaran Papua: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220701/15/1550012/sejarah-pemekaran-papua-dulu-irian-jaya-kini-punya-5-provinsi> .July 2022.
- Tatang Mulyana Sinaga. “Papua, Benteng Kita Yang Tersisa .”, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/01/08/papua-benteng-kita-menjaga-hutan-indonesia> . January 8, 2022.

Walikota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Salinan Perdano.2 ttg Rencana Pembangunan Jangka anjang Daerah-Gabungan (2024).

Watubun, Komarudin. “Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dan Peraturan Pelaksanaanya” 1 (2023): 1,2 &7.

Yuventus Lasa Banafanu. “PBD Susun Strategi Kelola Potensi SDA Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi.” [www.antaraneews.com/](http://www.antaraneews.com/), May 17, 2024.  
<https://www.antaraneews.com/berita/4108920/pbd-susun-strategi-kelola-potensi-sda-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>